

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 24 Oktober 2016. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

Entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria sebagai mana yang dimaksudkan dapat menerapkan SAK EMKM, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.1.1 Pengertian UMKM

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 1) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan pengertian UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 20 Tahun 2008.

2.1.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) , dijelaskan beberapa kriteria EMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, kriterianya adalah:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, kriterianya adalah :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, kriterianya adalah :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Ukuran Usaha	Total Aset (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp50.000.000
2	Kecil	Lebih dari Rp50.000.000 – Rp500.000.000	Lebih dari Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000
3	Menengah	Lebih dari Rp500.000.000	Lebih dari Rp2.500.000.000 - Rp50.000.000

Sumber : Undang-undang No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2 Perbedaan SAK EMKM dengan SAK ETAP

SAK EMKM merupakan standar yang dapat disebut sebagai pembaharuan dan pembenahan SAK ETAP, yang dinilai oleh para pelaku usaha UMKM maupun pembaca sebagai standar yang masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, SAK EMKM memperbaharui beberapa isi dan aturan yang ada di SAK ETAP untuk disesuaikan dengan para pelaku usaha UMKM, sehingga keduanya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan antara SAK ETAP dan SAK EMKM

Perbedaan	SAK ETAP	SAK EMKM
Persediaan	SAK ETAP mengukur nilai persediaan dengan mencari nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual setelah itu diukur biaya penyelesaian.	SAK EMKM mengukur nilai persediaan ketika diperoleh dan dicatat sebesar biaya perolehan persediaan tersebut.

Sumber : Putra, Christian Kemala (2019)

2.3 Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari proses akuntansi perusahaan tersebut. Jika proses akuntansinya tersusun dengan baik dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Untuk lebih memahami akuntansi, berikut ini penulis kemukakan beberapa definisi akuntansi menurut para ahli. Ada beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli diantaranya ialah:

Menurut Weygandt, dkk (2019) akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan. Menurut *American Accounting Association* dalam Soemarso (2018: 5) mendefinisikan “Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut Horngren dan Horison (2017: 4) Akuntansi adalah “Sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Berdasarkan pengertian akuntansi menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan

informasi keuangan yang kegiatannya berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

2.4 Pengertian Persediaan

Secara umum persediaan merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan, karena pada dasarnya persediaan dapat memperlancar jalannya kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan guna menghasilkan laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) No. 9 tahun 2018 yang dimaksud dengan persediaan adalah aset:

- a. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Dewi, dkk (2017: 128), “Persediaan adalah aset lancar berupa barang jadi yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan bahan yang diproses dalam proses produksi atau bahan yang disimpan untuk produksi.”

Menurut Martani (2016: 245) menyatakan bahwa “Persediaan adalah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya.”

Berdasarkan pengertian persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau barang yang masih dalam pengerjaan, ataupun barang dalam bentuk bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Persediaan harus diperhatikan secara rutin agar kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

2.5 Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan, apakah itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Weygandt, dkk (2018: 296) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga kategori:

1. Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) merupakan barang produksi yang selesai diproses dan siap untuk dijual.
2. Persediaan dalam proses (*work in process inventory*) merupakan bagian persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tetapi belum selesai.
3. Persediaan bahan baku (*raw materials*) merupakan barang-barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksi.

Menurut Warren (2016: 343), Persediaan pada setiap perusahaan berbeda dengan kegiatan bisnisnya. Persediaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Persediaan barang baku, barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain (misalnya dengan menabung) dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali.
2. Persediaan barang dalam proses barang yang terdiri dari bahan-bahan yang telah diproses namun masih membutuhkan pekerjaan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan bahan dalam proses, pada umumnya dinilai jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu.
3. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang telah diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. Produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.
4. Persediaan barang penolong meliputi semua barang yang dimiliki untuk keperluan produksi, tetapi tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi.

Sedangkan menurut Martani (2016: 246), persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Entitas perdagangan baik perusahaan ritel maupun perusahaan grosir mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang (*merchandise*

inventory). Persediaan barang dagang ini merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya.

2. Bagi entitas manufaktur, klasifikasi persediaan relatif beragam. Persediaan mencakup persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) yang merupakan barang yang telah siap dijual, persediaan barang dalam penyelesaian (*work in process inventory*) yang merupakan barang setengah jadi dan persediaan bahan baku (*raw material inventory*) yang merupakan bahan ataupun perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.
3. Bagi entitas jasa, biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Biaya persediaan pemberi jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja dan biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan tetapi diakui sebagai beban pada periode berikutnya.

Berdasarkan jenis-jenis persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis persediaan terbagi menjadi dua yaitu persediaan pada perusahaan dagang dan manufaktur. Adapun karakteristik sehingga dapat membedakan atau menggolongkan persediaan yang ada dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur.

2.6 Fungsi Persediaan

Menurut Heizer, Render & Munson (2017) dan Krajewski et al. (2016), fungsi persediaan sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan barang sesuai dengan permintaan itu sendiri dan perusahaan dapat melihat dari fluktuasi permintaan itu sendiri. Umumnya terjadi pada perusahaan ritel
2. Untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi.
3. Karena adanya diskon saat pembelian secara besar maka dapat menghemat pengeluaran perusahaan.
4. Dapat melakukan perlindungan terhadap perubahan nilai barang yang akan naik.

Sedangkan Menurut Assauri (2016: 226), Persediaan dapat memberikan beberapa fungsi, yang akan menambah fleksibilitas operasi produksi suatu perusahaan. Sejumlah fungsi yang diberikan persediaan, diantaranya adalah:

1. Untuk dapat memenuhi antisipasi permintaan pelanggan, dimana *inventory* merupakan upaya antisipasi stok, karena diharapkan dapat menjaga kepuasan yang diharapkan pelanggan.
2. Untuk memisahkan berbagai *parts* atau komponen dari operasi produksi, sehingga dapat dihindari hambatan dari adanya fluktuasi, karena telah adanya *inventory* ekstra guna memisahkan proses operasi produksi dengan pemasok.
3. Untuk memisahkan operasi perusahaan dari fluktuasi permintaan, dan memberikan suatu stok barang yang akan memungkinkan dilakukannya penSeleksian oleh pelanggan. *Inventory* itu merupakan jenis upaya membangun ritel.
4. *Inventory* berfungsi untuk memperlancar keperluan operasi produksi, dimana *inventory* dapat membangun kepercayaan dalam menghadapi terjadinya pola musiman, sehingga *inventory* ini disebut sebagai *inventory* musiman.
5. Untuk dapat memanfaatkan diskon kuantitas, karena dilakukannya pembelian dalam jumlah besar, sehingga mungkin dapat mengurangi biaya barang atau biaya pengirimannya.
6. Untuk memisahkan operasi produksi dengan kejadian atau event, dimana *inventory* digunakan sebagai penyangga diantara keberhasilan operasi produksi. Dengan demikian, kontinuitas operasi produksi dapat terjaga, dan dapat dihindari terdapatnya kejadian kerusakan peralatan, yang menyebabkan operasi produksi terhenti secara temporer.
7. Untuk melindungi kekurangan stok yang dihadapi perusahaan, karena terlambatnya kedatangan *delivery* dan adanya peningkatan permintaan, sehingga kemungkinan terdapatnya risiko kekurangan pasokan.
8. Untuk memagari terhadap inflasi, dan meningkatnya perubahan harga.
9. Untuk memanfaatkan keuntungan dari siklus pesanan, dengan cara meminimalisasi pembelian, dan biaya persediaan, yang dilakukan dengan membeli dalam jumlah yang melebihi jumlah kebutuhan segera.
10. Untuk memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penambahan barang segera, seperti menggunakan barang yang sedang dalam proses.

Berdasarkan fungsi persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi persediaan pada dasarnya ada pengadaan bahan baku produksi guna memenuhi kebutuhan bahan mentah atau setengah jadi yang akan diproses dalam kegiatan produksi dalam pemenuhan permintaan pelanggan.

2.7 Biaya-Biaya Persediaan

Persediaan yang dibeli berada dalam kondisi dan lokasi siap untuk digunakan atau dijual akan menimbulkan beberapa biaya-biaya persediaan. Ada

tiga jenis biaya dalam persediaan menurut Heizer, Render dan Munson (2017: 533) sebagai berikut :

1. Biaya penyimpanan (*Holding cost*)
Biaya penyimpanan adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terkait dengan menyimpan barang persediaan selama waktu tertentu.
2. Biaya pemesanan (*Ordering cost*)
Biaya pemesanan mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pemesanan, pembelian, biaya pengiriman, dukungan administrasi dan seterusnya untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Ketika pemesanan sedang diproduksi, biaya pemesanan juga ada, tetapi mereka adalah bagian dari biaya penyetelan.
3. Biaya penyetelan (*Setup cost*)
Biaya penyetelan adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pemesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Manajer operasional dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya penyetelan serta menggunakan prosedur yang efisien seperti pemesanan dan pembayaran elektronik.

Menurut SAK EMKM No. 09 (2018: 21), “Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.” Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam SAK EMKM juga menyatakan bahwa jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan penganturan yang ada dalam SAK EMKM, tetapi jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

Sedangkan menurut Martani (2016: 249), biaya persediaan meliputi biaya-biaya berikut ini:

1. Biaya persediaan
Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.
2. Biaya Pembelian
Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

3. Biaya Konversi

Biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya *overhead* produksi yang bersifat tetap maupun variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi.

4. Biaya Lainnya

Biaya lain yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang termasuk biaya lainnya misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen yang spesifik. Sedangkan biaya-biaya seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya pemborosan, biaya penyimpangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya persediaan.

Berdasarkan biaya-biaya persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya persediaan adalah seluruh biaya pembelian ditambah biaya-biaya lainnya yang terjadi agar persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

2.8 Metode Pencatatan Persediaan

Perusahaan dapat menggunakan sistem pencatatan persediaan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Sistem pencatatan persediaan menurut Martani (2016: 250) terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Sistem Periodik

Merupakan sistem pencatatan dimana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara *stock opname*.

2. Sistem Perpetual

Merupakan sistem pencatatan persediaan dimana pencatatan yang *up-to-date* terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 209) mengemukakan bahwa sistem pencatatan yang digunakan dalam pengelolaan persediaan ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Periodik

Sistem periodik mencatat persediaan hanya pada saat perhitungan fisik.

2. Sistem Perpetual

Sistem perpetual mencatat kuantitas persediaan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem pencatatan secara perpetual ini dapat

memberikan pengendalian yang efektif atas persediaan, karena informasi mengenai persediaan dapat segera tersedia dalam buku besar pembantu untuk masing-masing persediaan. Dalam sistem pencatatan perpetual, hasil dari perhitungan fisik dilakukan bukan untuk menghitung saldo akhir persediaan melainkan sebagai pengecekan saling mengenai keabsahan atas saldo persediaan yang dilaporkan dalam buku besar persediaan.

Sedangkan menurut Kieso et al (2018: 370) pencatatan persediaan yang digunakan yaitu:

1. Metode pencatatan perpetual

Dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian. Dalam sistem ini setiap pembelian akan dijurnal dalam akun persediaan barang dagangan, penjualan akan dijurnal pada akun penjualan dan harga pokok penjualan juga dijurnal. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo rekening persediaan. Nilai persediaan akhir dapat diketahui tapi perhitungan fisik tetap harus dilakukan untuk mencocokkan persediaan akhir menurut perhitungan fisik dengan catatan akuntansi.

2. Metode Fisik/Periodik

Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Dengan metode periodik, maka akun-akun seperti retur pembelian, potongan pembelian dan biaya angkut masuk digunakan secara terpisah, sedangkan pada metode perpetual untuk menentukan harga pokok penjualan tidak mengenal akun-akun tersebut, namun menggantinya dengan akun persediaan. Perhitungan fisik (*stock opname*) pada saat akhir periode mutlak harus dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan metode pencatatan periodik. Hal ini harus dilakukan agar dapat mengetahui dan menetapkan jumlah persediaan barang dagangan akhir dan harga pokok penjualan selama satu periode.

Berdasarkan metode pencatatan persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode pencatatan persediaan terbagi menjadi dua,

yaitu metode periodik (fisik) dan metode perpetual (buku), namun apabila dibandingkan cara pencatatan yang lebih baik adalah metode perpetual yang dapat membantu perusahaan untuk mengetahui jumlah persediaannya sewaktu-waktu dan kapan saja tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung ke gudang serta mempermudah perusahaan dalam penyusunan laporan laba rugi dan neraca pada akhir periode akuntansi.

2.9 Metode Penilaian Persediaan

Pada dasarnya suatu perusahaan akan mempertimbangkan dampak akibat pemilihan asumsi arus biaya dalam laporan laba rugi. Menurut SAK EMKM (2018: 21) Penilaian Persediaan, yaitu :

1. Entitas mengakui persediaan ketika persediaan diperoleh sebesar biaya perolehannya, sedangkan biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya.
2. Teknik pengukuran biaya persediaan dapat menggunakan metode eceran jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Penilaian persediaan entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya MPKP atau masuk pertama keluar pertama atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

Sedangkan Menurut Martani (2016: 252), terdapat tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh suatu perusahaan terkait dengan asumsi arus biaya yaitu:

1. Metode Identifikasi Khusus
Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu yang diatribusikan ke unit persediaan tertentu. Berdasarkan metode ini maka suatu entitas harus mengidentifikasi barang yang dijual dengan tiap jenis dalam persediaan secara spesifik. Metode ini pada dasarnya merupakan metode yang paling ideal karena terdapat kecocokan antara biaya dan pendapatan (*matching cost against revenue*), tetapi karena dibutuhkan pengidentifikasian barang persediaan secara satu persatu, maka biasanya metode ini hanya diterapkan pada suatu entitas yang memiliki persediaan sedikit, nilainya tinggi, dan dapat dibedakan satu sama lain, seperti galeri lukisan.
2. Metode Biaya Masuk Pertama Keluar Pertama
Metode Biaya Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO) mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Metode ini merupakan metode yang relatif konsisten dengan arus fisik

dari persediaan terutama untuk industri yang memiliki perputaran persediaan tinggi.

3. Metode Rata-rata Tertimbang

Metode Rata-rata Tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama satu periode. Perusahaan dapat menghitung rata-rata biaya secara berkala atau pada saat penerimaan kiriman. Untuk menghitung biaya persediaan dengan metode rata-rata tertimbang ini terlebih dahulu harus dihitung biaya rata-rata per unit yaitu dengan membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata tersebut.

Penggunaan metode penilaian persediaan dalam menentukan harga pokok penjualan tergantung pada kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Masing-masing metode penilaian yang telah diuraikan di atas, akan menghasilkan nilai harga pokok penjualan dan persediaan akhir yang berbeda. Jadi, penggunaan metode penilaian persediaan tersebut akan berpengaruh langsung pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 218), metode penilaian persediaan biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk:

1. Beban pokok penjualan untuk periode berjalan
2. Persediaan akhir
3. Laba kotor (dan laba bersih) untuk periode tersebut

Jika terjadi kenaikan harga pada setiap pembelian, metode MPKP akan menghasilkan jumlah paling rendah untuk beban pokok penjualan, serta jumlah paling tinggi untuk laba kotor (laba bersih), dan juga persediaan akhir. Metode rata-rata menghasilkan jumlah lebih tinggi untuk beban pokok penjualan dan jumlah yang lebih rendah untuk laba kotor (laba bersih), dan juga persediaan akhir dibandingkan metode MPKP.

Berdasarkan metode penilaian persediaan menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penilaian persediaan terbagi menjadi tiga yaitu masuk pertama keluar pertama (MPKP), Biaya rata-rata tertimbang (Average), dan Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP). Tiga metode ini dapat digunakan oleh perusahaan maupun suatu usaha untuk melakukan penilaian persediaan barang dagang sehingga terhindar dari kesalahan nilai.

2.10 Akibat Kesalahan Mencatat Persediaan

Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanyalah berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuatkan koreksinya baik terhadap rekening riil maupun rekening nominal. Menurut Warren (2016: 358) Setiap kesalahan dalam persediaan yang terjadi akan memengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Beberapa alasan terjadinya kesalahan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung.
2. Biaya-biaya dialokasikan secara tidak benar ke dalam persediaan.
3. Persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.
4. Persediaan konsinyasi dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.

Kesalahan dalam persediaan menurut Weygandt, dkk (2018: 309) akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yaitu:

1. Pengaruh pada Laporan Laba Rugi Persediaan akhir dari satu periode akan secara otomatis menjadi persediaan awal periode berikutnya. Jadi, kesalahan persediaan akan mempengaruhi beban pokok penjualan maupun laba neto di dua periode. Apabila kesalahannya mengurangsajikan persediaan awal, maka beban pokok penjualan akan menjadi kurang saji. Apabila kesalahannya mengurangsajikan persediaan akhir, maka beban pokok penjualan akan menjadi lebih saji.
2. Pengaruh terhadap laporan posisi keuangan Perusahaan dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan posisi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$
 - a. Apabila persediaan akhir mengalami lebih saji, maka aset dan ekuitas juga akan lebih saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.
 - b. Apabila persediaan akhir mengalami kurang saji, maka aset dan ekuitas juga akan kurang saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.

Sedangkan menurut Baridwan (2015), beberapa kesalahan pencatatan persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar akibat dari salah hitung, harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dijual.
Tahun berjalan: Laporan laba rugi; harga pokok penjualan terlalu kecil karena persediaan akhir terlalu besar. Neraca; persediaan barang terlalu besar dan modal terlalu besar.
Tahun berikutnya;
Laporan laba rugi; Harga pokok penjualan terlalu besar karena persediaan awal terlalu besar karena persediaan awal terlalu besar, dan laba terlalu kecil.
Neraca; kesalahan tahun lalu sudah diimbangi oleh kesalahan laporan laba rugi tahun ini sehingga neraca benar (*counter balanced*).
2. Persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil akibat dari salah hitung, harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dibeli. Kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah kebalikan dari kesalahan nomor 1 di atas.
3. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar bersama dengan belum dicatatnya piutang dan penjualan pada akhir periode.
Tahun berjalan;
Laporan laba rugi; penjualan terlalu kecil sebesar harga jual barang-barang tersebut dan harga pokok penjualan terlalu kecil sebesar harga pokok barang-barang tersebut sehingga laba bruto dan laba bersih terlalu kecil sebesar laba bruto dari penjualan tersebut.
Neraca; piutang terlalu kecil sebesar harga jual barang-barang tersebut dan persediaan barang terlalu besar sebesar harga pokok barang-barang tersebut, sehingga modal terlalu kecil sebesar laba bruto dari penjualan tersebut.
Tahun berikutnya:
Laporan laba rugi; penjualan tahun lalu dicatat dalam tahun ini sehingga penjualan terlalu besar sebesar harga jual. Harga pokok penjualan juga terlalu besar sebesar harga pokoknya, karena persediaan awal terlalu besar, sehingga laba bruto dan lebih bersih terlalu besar sebesar laba bruto penjualan tersebut. Neraca; kesalahan tahun lalu sudah diimbangi oleh kesalahan laporan laba rugi tahun ini sehingga neraca benar (*counter balanced*).
4. Persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil bersama dengan belum dicatatnya utang dan pembelian pada akhir periode.
Tahun berjalan:
Laporan laba rugi; pembelian terlalu kecil, tetapi diimbangi dengan persediaan akhir yang terlalu kecil. Oleh karena itu laba bruto dan laba bersihnya benar.
Neraca; modal benar, tetapi aktiva lancar dan utang jangka pendek terlalu kecil.
Tahun berikutnya:
Laporan laba rugi; persediaan awal terlalu kecil tetapi diimbangi pembelian yang terlalu besar karena pembelian tahun lalu dicatat dalam tahun ini. Oleh karena itu laba bruto dan laba bersihnya benar.

Neraca; kesalahan tahun lalu tidak mempengaruhi tahun ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam mencatat jumlah nilai persediaan barang akan mempengaruhi laba dalam laporan laba rugi dan mempengaruhi jumlah nilai persediaan dalam laporan posisi keuangan.

